

Analisis Kinerja Anggota Satpol PP Kota Bekasi Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi.

Dewo Septian¹, Wahidin Septa Zahran² * Renisya Ayu Utami³

^{1, 2} Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut STIAM I, Jakarta Indonesia

e-mail : dewoseptian595@gmail.com¹ Septazahran65@gmail.com² renisya@stiami.ac.id³*

*corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords :

Performance Analysis of Bekasi City Satpol PP Members in Controlling Street Vendors in Bekasi City.

The background of this research is the increasing number of street vendors (PKL) in Bekasi City who are not orderly, causing negative impacts due to misuse of the functions of public facilities and infrastructure and can reduce cleanliness, beauty, comfort and other aesthetic factors. This study aims to analyze the performance of members of the Bekasi City SATPOL PP in Controlling Street Vendors in Bekasi City. The researcher chose to use the worst measurement indicators put forward by Anwar Prabu Mangkunegara in his book entitled Enterprise Human Resource Management which includes 5 indicators. Namely Quality of Work, Quantity of Work Responsibility, Cooperation, and Initiative. This research uses descriptive research type using qualitative methods. The results of the study show that the performance of Bekasi City SATPOL PP members in controlling street vendors is quite good but not optimal because there are still several obstacles found in the implementation of controlling in the form of debates, blockades and intimidation.

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan usaha perdagangan atau berjualan dengan menggunakan sarana prasarana publik yang umumnya di pinggir jalan raya, di jalur trotoar, di halte bus dan di lokasi lainnya, baik yang sementara atau menetap. menyadari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat menimbulkan dampak negatif karena penyalahgunaan fungsi sarana dan prasarana publik serta dapat mengurangi kebersihan, keindahan, kenyamanan dan faktor estetika lainnya maka tindakan penataan Pedagang Kaki Lima menjadi kebutuhan mutlak yang harus dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman SATPOL PP Pasal 1 ayat (2) Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut POL PP adalah anggota SATPOL PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari SATPOL PP, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih melaksanakan kewenangannya SATPOL PP dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustial. Karenanya aparat Satpol PP seringkali harus menghadapi berbagai kendala. ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

Dalam menghadapi situasi seperti ini, SATPOL PP harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru SATPOL PP yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya hukum yang berlaku.

KAJIAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Administrasi Publik adalah fungsi dari pembuat keputusan perencanaan, perumusan tujuan, dansasaran, penggalangan kerjasama dengan DPR dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan rakyat dan dana bagi program pemerintah, pemantapan, dan perubahan organisasi, pengarahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian dan lain- lain fungsi yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga pemerintah lainnya.

Kinerja Pegawai

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2013:67), pengertian kinerja pegawai (prestasi kerja) adalah “hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan (2015) adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas kerja yaitu menunjukkan kerapihan, ketelitian, keterkaitan hasil kerja tidak mengabaikan Volume pekerjaan, Kualitas kerja yang baik dapat menghindari tingkat kesalahan dalam penyelesaian suatu pekerjaan yang dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan.
- b. Kuantitas kerja yaitu menunjukkan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam satu waktu sehingga efesiensi dan efektivitas dapat terlaksana sesuai dengan tujuan perusahaan.
- c. Tanggung jawab yaitu menunjukkan seberapa besar pegawai dalam menerima dan melaksanakan pekerjaannya, mempertanggung jawabkan hasil kerja serta sarana dan prasarana yang digunakan dan perilaku kerja setiap hari.
- d. Kerjasama yaitu kesediaan Pegawai untuk berpartisipasi dengan pegawai yang lain secara vertical dan horizontal baik didalam maupun diluar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik.
- e. Inisiatif yaitu dari dalam diri anggota perusahaan untuk melakukan pekerjaan serta mengatasi masalah dalam pekerjaan tanpa menunggu perintah dari atasan atau menunjukkan tanggung jawab dalam pekerjaan yang sudah kewajiban seorang pegawai

Indikator pengukuran kerja yang dikemukakan oleh Anwar Prabu Mangkunegara (2015). Penulis memilih menggunakan teori tentang pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Anwar Prabu Mangkunegara (2015) tersebut karena dipandang sesuai, lebih tepat, dan mampu mengukur kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi.

Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.

Kerangka Konseptual

SATPOL PP Kota Bekasi merupakan salah satu bagian dari lembaga yang dimiliki oleh Kota Bekasi. Keberadaan SATPOL PP di Kota Bekasi sangat penting karena salah satu tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penertiban lingkungan di masyarakat sehingga menciptakan kenyamanan dan ketentraman. Kendati keberadaan SATPOL PP Kota Bekasi sudah lama berdiri, namun masih saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di lapangan, terlebih pelanggaran dalam hal penertiban PKL. Dengan masih adanya temuan pelanggaran ini mengakibatkan keberadaan SATPOL PP Kota Bekasi saat ini menjadi sorotan masyarakat yang mempertanyakan tentang kinerja dari SATPOL PP Kota Bekasi. Berangkat dari permasalahan yang timbul ke permukaan ini, maka kerangka konseptual dari penelitian ini adalah ingin menganalisis Kinerja Anggota SATPOL PP Kota Bekasi dalam menertibkan PKL di Kota Bekasi.

Agar tujuan dan sasaran lebih tepat maka penelitian ini menggunakan teori menurut Anwar Prabu Mangkunegara dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan (2015) menekankan 5 indikator yang sangat mempengaruhi kinerja yaitu Kualitas kerja, Kuantitas kerja, Tanggung jawab, Kerjasama, dan Inisiatif. Dengan menggunakan 5 indikator tersebut, diharapkan dapat melihat faktor, hambatan, serta upaya yang dilakukan sehingga kinerja anggota SATPOL PP Kota Bekasi dapat meningkat.

Model Koseptual

Gambar II.1.
Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2015)



METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan gejala atau kenyataan yang ada sehingga data yang disimpulkan dalam penelitian akan dijelaskan secara rinci dan jelas.

Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. sementara metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya).

Metode penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Artinya penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri tanpa ada pengaruh atau hubungan terhadap variabel lain seperti penelitian eksperimen atau kolerasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam subbab ini peneliti akan memaparkan penjelasan hasil data dan informasi yang telah diperoleh. Data tersebut di analisis secara sistematis, terinci dan kritis dengan menggunakan teknik analisis pengumpulan data : wawancara, observasi, studi dokumentasi dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Untuk memperoleh data secara representatif, diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji/bahas. Pembahasan merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian, dari hasil penelitian yang di dapatkan maka penulis menguraikan pembahasan sebagai berikut :

Kinerja Anggota SATPOL PP Kota Bekasi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi. Kinerja merupakan poin penting yang harus diperhatikan dalam sebuah kelembagaan agar tercapainya suatu keberhasilan. Ada beberapa indikator kinerja yang harus diketahui oleh seorang pemimpin atau atasan agar pegawainya dapat bekerja secara maksimal. Dalam hal ini peneliti mengkaitkan hasil penelitian dengan indikator kinerja yang dicetuskan oleh Anwar Prabu Mangkunegara dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan (2013:75).

a. Kualitas Kinerja

Kualitas kerja yaitu menunjukkan kerapihan, ketelitian, keterkaitan hasil kerja dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan. Kualitas kerja yang baik dapat menghindari tingkat kesalahan dalam penyelesaian suatu pekerjaan yang dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan bahwa kualitas kinerja anggota satpol pp kota bekasi sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan oleh anwar prabu mangkunegara tentang kerapihan, ketelitian, dan hasil kerja tanpa mengabaikan volume pekerjaan.

b. Kuantitas Kinerja

Kuantitas kerja yaitu menunjukan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam satu waktu sehingga efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam hal ini peneliti memperoleh data bahwa kuantitas kinerja anggota satpol pp kota Bekasi dalam penertiban pkl di kota Bekasi sudah baik dan memuaskan. Karena anggota satpol pp kota Bekasi jika ada pelanggaran yang terjadi saat patroli, anggota satpol pp kota Bekasi langsung menindak pkl yang melanggar dan hal ini sesuai dengan tupoksi satpol pp itu sendiri.

c. Tanggung Jawab

Tanggung jawab yaitu menunjukan seberapa besar pegawai dalam menerima dan melaksanakan pekerjaannya, mempertanggung jawabkan hasil kerja serta sarana dan prasarana yang digunakan dan perilaku kerjanya setiap hari. Terkait Tanggung Jawab Anggota satpol pp kota Bekasi sudah baik, karena selalu menyelesaikan tugas secara bersama-sama sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasil pekerjaan kepada pimpinan.

d. Kerjasama

Kerjasama yaitu kesediaan pegawai untuk berpartisipasi dengan pegawai yang lain secara vertical dan horizontal baik didalam maupun diluar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik. Kerjasama yang dilakukan Anggota satpol pp kota Bekasi dapat di kategorikan sudah baik, karena saat terjun ke lapangan dalam menertibkan pkl mereka satu komando, memiliki jiwa korsa yang tinggi, dan bersama-sama membantu pedagang dalam merapihkan lapak pedagang pasca penertiban.

e. Inisiatif

Inisiatif adalah kesadaran diri individu untuk melakukan pekerjaan serta mengatasi masalah dalam pekerjaan tanpa menunggu perintah dari atasan atau menunjukkan tanggung jawab dalam pekerjaan yang sudah menjadi kewajiban seorang pegawai. Dalam hal ini inisiatif yang dimiliki anggota satpol pp kota Bekasi dalam penertiban pkl di kota Bekasi secara individu dinilai baik. Karena antar anggota saling membantu rekannya tanpa menunggu untuk dimintai bantuan, serta langsung menindak para pkl yang melanggar aturan pada saat patrol. tanpa harus menunggu perintah dari atasan. Dalam hal ini inisiatif anggota satpol pp kota Bekasi secara individu juga dinilai baik oleh pedagang, karena anggota satpol pp ikut membantu merapihkan lapak dagangan pasca penertiban, walaupun tidak semua pedagang merasakan hal yang sama.

Faktor apa saja yang menghambat kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima Tentunya banyak hambatan – hambatan yang dialami Anggota SATPOL PP Kota Bekasi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi yaitu :

a. **Perdebatan**

Perdebatan dalam hal ini kurang nya pemahaman para pedagang tentang aturan yang berlaku, sehingga perdebatan kerap terjadi pada saat penertiban berlangsung.

b. **Blokade**

Bentuk hambatan selanjutnya berupa blokade yang dilakukan oleh pedagang kaki lima pada saat Anggota SATPOL PP Kota Bekasi melakukan penertiban.

c. **Intimidasi**

Perlawanan yang dihadapi Anggota SATPOL PP Kota Bekasi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima berupa Intimidasi dari beberapa pihak yang menjadi backing para pedagang.

Apa solusi untuk mengatasi hambatan kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima :

a. **Sosialisasi**

Mensosialisasikan aturan yang berlaku kepada para pedagang guna meningkatkan pemahaman para pedagang terkait aturan berjualan yang berlaku di Kota Bekasi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perdebatan antara anggota satpol pp kota bekasi dengan pedagang kaki lima.

b. **Pendekatan secara persuasif**

Adanya pendekatan secara persuasif apabila saat melakukan penertiban mendapatkan perlawanan atau blokade dari pedagang yang ditertibkan.

c. **Berkerjasama**

Memberikan Pemahaman kepada para pihak yang menjadi backing para pedagang dan mengajak mereka bekerjasama untuk membangun kota bekasi agar lebih terlihat rapih dan indah.

KESIMPULAN

Kinerja Anggota SATPOL PP Kota Bekasi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima dikota Bekasi sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Anwar Prabu Mangkunegara yaitu kualitas kinerja, kuantitas kinerja, tanggung jawab, kerjasama, dan Inisiatif. Kinerja Anggota SATPOL PP Kota Bekasi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi sudah cukup baik namun belum maksimal.

SARAN

Untuk KA SATPOL PP Kota Bekasi agar Lebih memberikan penekanan kepada anggotanya untuk bersikap humanis dalam melakukan penerbitan sehingga para pedagang yang ditertibkan tidak merasa diperlakukan semena-mena, Juga untuk menghindari terjadinya gesekan atau bentrokan antara anggota SATPOL PP Kota Bekasi dengan para pedagang pada saat melakukan penertiban.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).
- [2] Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Buku :

- [1] Anwar Prabu Mangkunegara, 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Cetakan kedua belas. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- [2] Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Erlangga : Bandung

Jurnal

- [1] Bonni Edwandar & Dr. H. Zaili Rusli, SD, M.Si, 2017. Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru). Jurnal Penelitian Sosial. Volume 4. Nomor 1. <https://www.neliti.com/id/publications/123105/efektivitas-kinerja-satuan-polisi-pamong-praja-dalam-penertiban-pedagang-kaki-li>
- [2] Rahmi Andini Syamsudin, 2020. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL) Kecamatan Serpong dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Serpong. Jurnal Ilmiah Semarang. Volume 3, Nomor 1.
- [3] <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/smk/article/view/4498>
- [4] Ridwan, Heri Kusmanto, Warjio dan AbdulKadir, 2020. Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik. Volume 2, Nomor 1. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi/article/view/41>
- [5] Rico Firmanda, M. Fachri Adnan, Agustus 2021. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang. Jurnal Ilmiah Mandala Education. Volume 7. Nomor 3. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/2299>
- [6] Farhan Al' Afif Fahmi, Azharisman Rozie, Selamat Jalaludin, Maret 2022. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar. Jurnal Tatapamong. Volume 4. Nomor 1. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/download/2445/1283>
- [7] L Warlina, M Yusuf, S S Ramadhani, G I Ohoitmur, 2021. Planning for Relocation Area of Street Food Vendor in Bandung City. International Journal of Design. Vol 1. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/injudes/article/view/4831>
- [8] Anwar Prabu Mangkunegara, 2013. Pengertian kinerja pegawai (Prestasi) <http://repository.unpas.ac.id/13799/4/9.%20BAB%20II.pdf>

- [9] Bambang Guritno dan Waridin dalam Heny Sidanti, 2015. Pengertian Kinerja Pegawai
<http://repository.unpas.ac.id/13799/4/9.%20BAB%20II.pdf>
- [10] Robbins, 2016. Indikator Kinerja
- [11] http://repository.um-surabaya.ac.id/3995/3/BAB_II.pdf
- [12] Mangkunegara, 2017. Indikator Kinerja Karyawan.
<http://repo.darmajaya.ac.id/5850/7/BAB%20II.pdf>
- [13] Wibowo, 2015. Indikator Kinerja Pegawai.
<http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/976/11.%20BAB%20II.pdf?sequence=11&isAllowed=y>
- [14] Dharma, 2014. Indikator Kinerja. <https://media.neliti.com/media/publications/441272-none-12aacf6b.pdf>